

Re-Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Sosial Budaya Indonesia

Nurva Miliano^{a, 1*}, Dinie Anggraeni Dewi^{a, 2}

^a Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

¹ nurvamiliano@upi.edu*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 2 Januari 2022;

Revised: 18 Januari 2022;

Accepted: 26 Januari 2022.

Kata-kata kunci:

Pancasila;

Re-Implementasi;

Sosial Budaya.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami nilai-nilai Pancasila yang dapat mengatasi masalah sosial budaya yang ada di Indonesia. Kajian penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka melalui buku, jurnal, dan artikel yang relevan sebagai dasar pembahasannya. Hasil kajian menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila merupakan tameng yang mampu mencegah terjadinya penyimpangan. Mengingat nilai-nilai Pancasila seperti sebuah pedoman hidup yang tidak akan hilang dari waktu dan perkembangannya. Pancasila adalah suatu produk yang dibentuk melalui segala jenis pemikiran yang matang dan memang diarahkan sebagai kitab masyarakat Indonesia untuk menjalani kehidupan pada setiap fasenya. Oleh karena itu, perlu rasanya mengembalikan kesadaran setiap individu untuk mengimplementasikan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan ini. Semakin deras arus menuju peradaban maka seharusnya semakin kuat pula masyarakat Indonesia menggenggam Pancasila demi mencapai keselamatan. Kekemelutan sosial budaya yang ada saat ini, tak lain dikarenakan oleh masyarakat Indonesia yang mulai meremehkan kekuatan Pancasila di tengah-tengah benturan antarbudaya yang terjadi, seperti globalisasi.

Keywords:

Pancasila;

Re-Implementation;

Socio-Cultural.

ABSTRACT

Re-Implementation of Pancasila in Indonesian Socio-Cultural Life. This research aims to understand the values of Pancasila that can overcome the socio-cultural problem that exists in Indonesia. This research study uses descriptive qualitative with library study methods through books, journals, and relevant articles as the basis for the discussion. The results of the study showed that the values of Pancasila are shields that are able to prevent irregularities. Considering the values of Pancasila as a guideline of life that will not disappear from its time and development. Pancasila is a product formed through all kinds of mature thinking and is directed as a book of Indonesian society to live life at every phase. Therefore, it is necessary to restore the awareness of each individual to re-implement the values of Pancasila in this life. The stronger the flow to civilization, the stronger the Indonesian people should hold Pancasila in order to achieve safety. The socio-cultural disdain that exists today, is none other than due to the Indonesian people who began to underestimate the power of Pancasila in the midst of intercultural clashes that occurred, such as globalization.

Copyright © 2022 (Nurva Miliano & Dinie Anggraeni Dewi). All Right Reserved

How to Cite: Miliano, N., & Dewi, D. A. (2022). Re-Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Sosial Budaya Indonesia. *Antropocene : Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora*, 2(1), 15–21.
<https://doi.org/10.56393/antropocene.v1i4.204>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Pancasila adalah sebuah produk hasil penggalian dari pembauran masyarakat Indonesia yang dibentuk melalui pemikiran para tokoh hebat Indonesia, yaitu Soekarno, Yamin, Soepomo, dan lain sebagainya (Wiratmaja, Suacana, & Sudana, 2021). Pancasila sebagai ideologi negara, pandangan hidup bangsa, dan dasar negara Republik Indonesia memiliki kekuatan pada setiap nilainya ketika diimplementasikan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dibuktikan dengan mengulik kembali pandangan pada sejarah kemerdekaan Indonesia ini. Pancasila menjadi sumber kekuatan jiwa seluruh rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaannya dengan mempersiapkan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu sebagai landasan fundamental dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara (Aridhayandi, 2018).

Pancasila ialah pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu setiap nilai Pancasila menjadi sebuah tekad para pahlawan untuk bersatu dalam mengusir penjajah yang jika dilihat dari senjata, Indonesia akan kalah. Hal yang dapat dibuktikan saat ini, karena pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dengan baik, Indonesia mendapat kemenangannya sendiri dengan kekuatan untuk saling bersama memerangi penjajah. Lalu, sebagaimana Pancasila menjadi ideologi negara Indonesia. Hal ini terjadi karena sadarnya masyarakat pada saat itu akan kekuatan besar yang dimiliki oleh eksistensi nilai-nilai Pancasila. Masyarakat sadar akan kesesuaian nilai-nilai Pancasila dengan karakteristik budaya Indonesia. Hal ini terjadi karena pada hakikatnya Pancasila memang dibentuk dari nilai-nilai kebudayaan, nilai-nilai adat istiadat, dan nilai religius yang ada pada bauran masyarakat Indonesia sendiri. Bahkan, penjajah saja selalu berusaha melengserkan Pancasila pada kedudukannya. Hal ini dikarenakan oleh adanya kesadaran penjajah terhadap nilai-nilai Pancasila yang hakikatnya merupakan tameng tahan banting yang bisa menuntun bangsa Indonesia pada kemajuan jika dapat terimplementasi dengan baik dalam kehidupan.

Namun, sangat disayangkan bahwasanya nilai-nilai Pancasila seolah-olah luntur dari bangsa Indonesia karena kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia untuk mengimplementasikan Pancasila dengan baik di kehidupan sehari-hari. Ada ditemukan tindakan-tindakan amoral akibat lepasnya jabat tangan manusia kepada Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia, seperti ketidakadilan hukum, Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), pemerkosaan, pembunuhan, intoleransi, tawuran antarpelajar, ketidakpedulian, dan tindakan-tindakan amoral lainnya yang sudah bermunculan ditengah masyarakat Indonesia (Herlambang, 2018).

Masyarakat perlu mengetahui bahwa di tengah-tengah arus kehidupan ini justru masyarakat harus berpegang teguh lebih pada Pancasila agar tidak terseret arus dan tersesat di tengah-tengah kehidupan ini, terutama dalam bidang sosial budaya. Jika dahulu nilai-nilai Pancasila berhasil membangun kekuatan masyarakat untuk melawan penjajah maka di hari ini dan masa depan, nilai-nilai Pancasila juga akan berhasil melawan tantangan-tantangan yang ada di kehidupan ini dengan syarat Pancasila harus mampu diimplementasikan dengan baik. Oleh karena itu, perlu adanya re-implementasi nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sosial budaya karena sejatinya Pancasila memiliki eksistensi yang abadi.

Secara etimologis Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta India (bahasa kasta Brahmana) yaitu *Pancasyila*. *Pancasyila* terdiri dari dua macam arti, yaitu *Panca* yang artinya lima dan *Syila* yang artinya dasar, batu sendi atau alas sehingga *Pancasyila* dapat diartikan sebagai lima dasar. Selain itu, *Pancasyila* juga dapat diartikan dengan lima untuk *Panca* dan diartikan dengan peraturan tingkah laku untuk *Syila* sehingga *Pancasyiila* dapat diartikan sebagai lima aturan tingkah laku yang baik (Setijo: 2010). Sejalan dengan itu, menurut Moh. Yamin (1960), secara etimologis, kata Pancasila diambil dari *Pancasyila* dengan huruf vokal i pendek yang artinya lima unsur dasar dan *Pancasyiila* dengan huruf vokal i panjang yang artinya lima aturan bertingkah laku yang baik.

Kedatangan Jepang ke Indonesia tahun 1942 awalnya mendapat sambutan yang sangat baik oleh rakyat Indonesia karena kemurahanhatian Jepang kepada masyarakat Indonesia saat itu. Setelah

mendapat siksaan yang amat menderita, Jepang datang seolah-olah menjadi titik terang bagi berakhirnya penderitaan rakyat Indonesia. Hal ini dikarenakan saat awal Jepang menduduki Indonesia, Jepang sangat empati terhadap penderitaan rakyat sehingga rakyat diperbolehkan untuk mengumandangkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan mengibarkan bendera merah putih yang mana hal ini tidak diperbolehkan ada ketika masa penjajahan Belanda. Jepang juga menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia sebagai bentuk hadiah Jepang kepada Indonesia pada tanggal 7 September 1944 oleh Perdana Menteri Koiso di hadapan Parlemen Jepang. Namun, nyatanya Jepang malah membuat penderitaan rakyat Indonesia semakin bertambah (Kaderi: 2015).

Selanjutnya, karena keterdesakkan Jepang oleh sekutu, Jepang kembali menawarkan kemerdekaan untuk menarik kembali simpatik rakyat Indonesia. Pemerintah Jepang membentuk suatu badan yang dinamakan "*Dokuritzu Zyunbi Tyoosakai*" atau yang dikenal dengan BPUPKI (Badan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 29 April 1945 untuk menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia yang dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 (Soemantri: 1992). BPUPKI merupakan badan yang diketuai oleh Dr. Radjiman Wediodiningrat dengan wakil ketuanya adalah Yoshio Ichibangase (Warga Negara Jepang) dan RP. Soeroso beserta 64 anggota (Marsudi: 2001). Namun, janji kemerdekaan Jepang kepada Indonesia hanyalah bualan semata. Akan tetapi, karena kegigihan untuk merdeka, setelah dilantik pada tanggal 28 Mei 1945, BPUPKI tetap melaksanakan sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei-1 Juni 1945. Sidang pertama digagas oleh Dr. Radjiman untuk merumuskan suatu dasar negara. Hal ini dikarenakan Dr. Radjiman menyadai bahwa sebuah negara harus memiliki sebuah pondasi sebagai tempat berpijak dan berpegang teguh. Oleh karena itu, berbagai pemikiran dikemukakan pada sidang ini.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka. Sedangkan instrumen penelitian ini adalah peneliti sendiri. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tinjauan literatur dari sumber-sumber yang relevan dengan pembahasan, seperti buku, jurnal, dan artikel. Teknik analisis data dimulai dengan mengumpulkan data terlebih dahulu dari sumber-sumber relevan lalu data yang terkumpul dianalisis secara terperinci hingga menghasilkan kesimpulan

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil tinjauan dari beberapa sumber dapat dikatakan bahwa nilai-nilai Pancasila akan terus relevan dengan kehidupan di Indonesia ini maka perlu untuk re-implementasi Pancasila dalam kehidupan. Hal ini terjadi karena memang sejatinya nilai-nilai Pancasila bukanlah sesuatu yang baru, melainkan sudah mandarah daging dalam bauran masyarakat Indonesia sebelum nilai-nilai tersebut dinamakan menjadi Pancasila. Pada zaman kerajaan pun nilai-nilai Pancasila memang sudah berdiri di tengah-tengah masyarakat Indonesia (Brata, 2017). Hal ini dapat dibuktikan dengan benda-benda peninggalan Kerajaan Majapahit, seperti kepercayaan akan Tuhan yang memiliki kekuatan, gotong royong, maupun musyawarah. Bukti lainnya dapat juga dilihat dalam syair pujian di buku Negarakertagama yang berbunyi "*Yatnaggegwani Pancasyiila Kertangsangskarbhisekaka Kerama*" yang menandung makna bahwa seorang raja harus setia pada kelima pantangan (Pancasila) dalam menjalankan kerajaannya, upacara-upacara ibadah, dan penobatan-penobatan (Kaelan, 2004). Pancasila merupakan sebuah hasil, karya, maupun produk yang digali kembali seperti harta karun oleh pemikiran para tokoh penggagas sebagai sebuah dasar negara, pandangan hidup, ideologi negara, maupun pegangan bagi masyarakat Indonesia dan sebagai kompas yang memberi arah bagi karakter warga negara (Gultom, Widiyatmoko, & Wadu, 2020).

Re-implementasi nilai-nilai Pancasila perlu untuk ditanamkan kembali oleh bangsa Indonesia di tengah kemelut rusaknya sosial budaya bangsa akibat kurangnya kesadaran masyarakat maupun globalisasi. Kerusakan sosial budaya bangsa Indonesia pada hakikatnya hanya bisa diselamatkan oleh

sebuah kitab yang bercermin dari kondisi bangsa Indonesia itu sendiri, yaitu Pancasila (Rahman: 2018). Sama seperti halnya sebuah penyakit kanker yang akan sembuh jika diberi penanganan kanker terbaik maka mengimplementasikan kembali nilai-nilai Pancasila yang terdiri dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan di tengah-tengah masyarakat merupakan sebuah obat mujarab yang akan menyembuhkan kerusakan sosial budaya Indonesia. Selain itu, nilai-nilai Pancasila memiliki sifat-sifat yang dapat dipakai dan diakui kekuatannya oleh semua negara, yaitu sifat universal dan objektif. Pancasila dapat menuntun masyarakat untuk bersikap baik dan menuju kemajuan. Namun, Pancasila tidak akan melakukan semua itu jika tidak ada penggerak karena hakikatnya Pancasila hanyalah sebuah hasil pemikiran yang tak memiliki anggota gerak jika tidak ada yang menggerakkannya, yaitu manusia itu sendiri. Nilai-nilai Pancasila ini dapat dilihat lebih lanjut maknanya sebagai berikut: pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama ini mengandung nilai-nilai yang mengharuskan manusia sebagaimana makhluk ciptaan Tuhan harus menjalankan segala kewajiban dan menjauhi segala larangan yang Tuhan berikan. Masyarakat memiliki hak untuk menganut suatu agama tanpa paksaan dari suatu pihak mana pun, menjalankan kewajiban dan menjauhi larangan agama yang dianut.

Kedua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Sila kedua ini mengandung nilai-nilai yang mengharuskan manusia sebagaimana kodratnya memiliki kesamaan derajat di mata Tuhan juga harus memiliki kesamaan derajat di mata hukum yang ada dengan saling menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini mengandung nilai-nilai yang mengharuskan manusia yang satu dengan manusia yang lain saling bersatu karena pada hakikatnya persatuan ini adalah satu atau bulat yang tidak akan terpecah belah. Melihat dari latar belakang budaya Indonesia sendiri yang memiliki aneka ragam budaya mewanti-wanti bangsa ini untuk saling toleransi demi tercapainya persatuan bangsa (Sarifah & Barus, 2019).

Ketiga, Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Sila keempat ini mengandung nilai-nilai yang mengharuskan masyarakat Indonesia untuk selalu berdemokrasi dan bermusyawarah di tengah keberagaman budaya demi mengambil suatu keputusan terbaik dengan memosisikan kedudukan hak dan kewajiban manusia sebagai warga negara yang sama serta memberi masyarakat kebebasan untuk menggunakan hak-haknya demi kepentingan bangsa Indonesia. Kelima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sila kelima ini mengandung nilai-nilai yang menjamin kemakmuran yang merata sesuai porsinya kepada seluruh rakyat atas seluruh kekayaan bangsa Indonesia ini untuk digunakan demi kebahagiaan dan kesejahteraan rakyat bersama serta Makna dalam sila ini adalah adanya kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat, aseluruh kekayaan dan sebagainya dipergunakan untuk kebahagiaan bersama serta saling melindungi satu sama lain.

Pancasila dari maknanya memiliki nilai-nilai yang sangat baik dan memang pantas jika diibaratkan sebagai sebuah kitab yang akan menuntun pengikutnya pada kesejahteraan dunia dan akhirat jika diamalkan secara bijak. Karena pada hakikatnya, Pancasila merupakan sebuah kristalisasi nilai-nilai yang diakui kebenarannya untuk diterapkan di masyarakat Indonesia.

Pada saat ini, bangsa Indonesia tidak bisa menutup diri dari budaya negara lain karena adanya globalisasi. Globalisasi sendiri dapat diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan adanya interaksi antarnegara yang saling mempengaruhi aspek-aspek negaranya, termasuk sosial budayanya sehingga manusia yang satu dengan yang lainnya dapat berinteraksi secara luas tanpa ada batasan negara. Globalisasi masuk begitu cepat ke dalam bauran masyarakat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dampak-dampak yang diberikan dengan adanya globalisasi ini pun beragam. Namun, karena kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia akan pengimplementasian nilai-nilai Pancasila maka dampak negatif adanya globalisasi ini juga membaur menjadi satu dengan bauran masyarakat Indonesia. Padahal semakin zaman menuju peradabannya, Pancasila akan semakin dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia untuk bisa menjadi jembatan menyebrangi arus kesesatan yang semakin deras. Sehingga dengan ketidakmampuan masyarakat untuk menutup pintu terhadap globalisasi ialah masyarakat perlu untuk

menyaring atau memisahkan sesuatu yang baik dengan yang buruk dari pengaruh globalisasi ataupun memisahkan pengaruh-pengaruh yang menyimpang dengan pengaruh yang tidak akan menyimpang dari nilai-nilai Pancasila.

Kerusakan sosial budaya yang pertama dapat dilihat dengan adanya segolongan orang-orang yang mencoba memisahkan ketuhanan dengan kehidupan karena terkecoh dengan budaya liberalisme yang masuk ke Indonesia sehingga masyarakat merasa bahwasanya hakikat manusia itu adalah makhluk yang bebas tanpa tanggung jawab untuk melakukan kewajiban dan menjauhi larangan sesuai agama yang dianutnya. Banyak orang-orang yang mengalihkan pusat berserah dirinya kepada minum-minuman keras daripada kepada Tuhan karena kurangnya kesadaran akan kuasa Tuhan dan menganggap minuman keras dapat menghilangkan segala kepenatan yang ada dan juga kesenangan duniawi akan seks bebas.

Jika dianalisis kembali dari nilai sila pertama Pancasila, re-implementasi nilai sila Pancasila pertama ini sangat relevan untuk mengajak masyarakat yang mulai kehilangan arah ini kembali kepada jalan yang benar karena hikakatnya negara Indonesia merupakan negara yang berketuhanan. Akibat nilai-nilai Pancasila yang saling bersinergi satu sama lain maka dengan adanya re-implementasi sila pertama ini bisa memperbaiki dampak-dampak negatif atau tindakan-tindakan amoral lainnya yang sudah tersebar di masyarakat Indonesia ini. Hal ini dapat dianalogikan dengan adanya manusia-manusia yang takut akan Tuhan maka manusia-manusia itu akan selalu berusaha melakukan hal-hal baik tanpa ada sedikitpun berkeinginan melakukan penyimpangan. Sehingga dengan diamalkannya sila pertama Pancasila akan mampu memperbaiki segala tindakan-tindakan amoral lain. Namun, perlu diingat kembali bahwasanya nilai-nilai Pancasila merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan sehingga akan lebih berjaya lagi negara Indonesia ini jika masyarakatnya saling mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan.

Selanjutnya, kecenderungan masyarakat saat ini untuk berpakaian yang tidak sesuai dengan adab-adab budaya yang ada di Indonesia, seperti cara berpakaian yang terlalu terbuka, gaya rambut berwarna-warni, pemakaian aksesoris wanita pada laki-laki seperti anting dan kalung, minum-minuman keras, pergaulan bebas, dan lain sebagainya. Jika dianalisis kembali kepada sila kedua Pancasila, re-implementasi sila kedua ini sangat membantu masyarakat untuk mencegah penyimpangan sosial budaya dimana adanya kesadaran masyarakat untuk selalu beradab dalam menyikapi segala hal yang ada akan membantu masyarakat untuk tetap memiliki adab yang baik dan sopan sesuai dengan budaya Indonesia. Sila kedua ini memang dipersiapkan oleh para penggagas untuk menjadikan masyarakat Indonesia di tengah keberagaman ini mampu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan (Rosyad, 2019).

Lalu, selain dampak dari globalisasi, rendahnya pemahaman masyarakat Indonesia akan Pancasila yang tak akan pernah lapuk oleh waktupun terasa masih kurang. Orang-orang yang bersikap ego terhadap budayanya masing-masing ataupun sikap individualis. Indonesia bukanlah negara seragam, melainkan beragam. Seharusnya tiap-tiap masyarakat dapat memahami sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Sila ketiga ini telah dipikirkan dengan baik-baik oleh para penggagas bangsa yang selanjutnya diamanatkan kepada masyarakat dahulu, sekarang dan masa depan. Para penggagas menyadari keberagaman bangsa Indonesia ini bisa menjadi dua buah mata pisau yang akan memberi keuntungan ataupun kerugian tergantung bagaimana seseorang memperlakukannya. Sehingga diamanatkanlah masyarakat dengan persatuan Indonesia, artinya masyarakat diminta untuk selalu satu, utuh, maupun bulat di tengah-tengah keberagaman yang ada dengan cara saling toleransi, saling mencintai saudara setanah air, dan tidak etnosentrisme serta tidak individualis, melainkan masyarakat bersama-sama membangun budaya daerahnya tanpa menjatuhkan budaya daerah lain untuk bersama-sama memajukan negara Indonesia (Zubaedi, 2016).

Menurut Muzayin (1992) Pancasila sebuah kristalisasi nilai-nilai yang mengandung cita-cita hidup bangsa Indonesia di tengah keanekaragaman budaya. Sehingga perpecahan akan sulit terjadi

ketika masyarakat bertumpu pada pola hidup yang terkandung di dalam nilai-nilai Pancasila karena hidup dalam balutan keserasian, keseimbangan, dan keselarasan. Selain itu, masih ditemukan tindakan-tindakan amoral lainnya, seperti kecurangan-kecurangan yang dilakukan ketika pemilu terjadi. Padahal jika dikaitkan sila keempat Pancasila, Indonesia merupakan negara demokrasi. Negara yang seharusnya memberikan kedaulatannya kepada rakyat, bukan membeli suara mereka dengan suap dan sejenisnya. Dengan adanya re-implementasi sila keempat Pancasila, masyarakat akan lebih sadar akan bagaimana seharusnya demokrasi berjalan dalam masyarakat. Kesadaran demokrasi yang tinggi tidak akan melahirkan generasi-generasi yang takluk terhadap uang suap karena merasa kesejahteraan rakyat akan lebih penting daripada kesejahteraan pribadi. Sejalan dengan itu, Arjoso (2002) juga menyatakan bahwa kuatnya negara Indonesia secara mutlak ialah menjunjung tinggi nilai permusyawaratan perwakilan ini dalam kehidupan.

Nilai-nilai Pancasila harus berjalan seimbang, maka re-implementasi sila kelima juga perlu dilakukan, di tengah-tengah kehidupan ini banyak dilihat ketidakmerataan dalam segala aspek, seperti ketidakmerataan pendidikan, ketidakmerataan hukum, maupun ketidakmerataan kesejahteraan. Padahal aspek-aspek tersebut sejatinya adalah hak-hak yang harus diterima oleh masyarakat Indonesia. Hal ini kembali lagi hadir karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pengimplementasian nilai-nilai keadilan dalam kehidupan. banyak oknum-oknum nakal yang cerdas akal nya tapi tidak cerdas dengan hati nuraninya sehingga berani melakukan korupsi yang dapat diartikan sebagai sebuah perampokkan hak orang lain sehingga menjadi salah satu sumber ketidakadilan ini. Hal ini terjadi karena adanya korupsi juga menjadi salah satu penyebab bagaimana proses pemerataan kesejahteraan di masyarakat harus terhambat karena hak-hak yang harus diterima suatu kaum tidak dapat tersalurkan. Padahal keadilan merupakan sebuah kunci suatu bangsa dapat mencapai kemakmuran karena adanya rasa egaliter antara manusia yang satu dengan manusia lainnya menyebabkan kecil kemungkinan untuk saling menjatuhkan martabat sesamanya (Febriansyah, 2017).

Simpulan

Sebagaimana telah dipaparkan di atas, Pancasila dapat dinyatakan sebagai sebuah pemikiran yang nilai-nilainya tidak akan pernah sirna ditelan waktu. Re-implementasi Pancasila dalam kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia memang sudah seharusnya ada dalam kehidupan. Pancasila memang sebuah amanat dari para leluhur kepada masyarakat untuk bisa bertahan dalam melewati segala poros kehidupan. Re-implementasi ini akan mencegah masyarakat untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan yang memang bukan berdasar pada Pancasila. Re-implementasi ini dapat dimulai dengan membangun kembali kesadaran pada setiap masyarakat untuk mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan. Hal ini bisa dilakukan dengan kesadaran bertoleransi terhadap segala perbedaan yang ada, baik suku, agama, ras, dan antargolongan lainnya, menempatkan manusia pada kodratnya dan saling menjunjung tinggi harkat serta martabat manusia, mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, tolong menolong satu sama lain tanpa pandang bulu, dan memberikan keadilan sesuai porsinya.

Referensi

- Arjoso, A. (2002). *Pancasila Dasar Falsafah Negara*. Jakarta: Yayasan Kepada Bangsaaku
- Aridhayandi, M. R. (2018). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) di bidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(4), 883-902.
- Basyir, K., dkk. (2013). *Pancasila dan Kewarganegaraan*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press
- Brata, I. B., dkk. (2017). Lahirnya Pancasila Sebagai Pemersatu Bangsa Indonesia. *JurnalSantiaji Pendidikan*, 7 (1), 120-132.
- Darmodiharjo, D., dkk. (1996). *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

- Enda. (2010). *Ilmu Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Febriansyah, F. I. (2017). Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa. DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 13(25), 1-27.
- Gultom, A.F., Widijatmoko, E.K, & Wadu, L.B. (2020). Penginternalisasikan Karakter Kewarganegaraan Generasi Muda Kota Batu Melalui Kegiatan Retret, 2(2), 45-51. <https://doi.org/10.36805/jurnalbuanapengabdian.v2i2.1292>
- Gunawan, A. H. (2000). *Sosiologi Pendidikan Suatu Analisis Sosiologi tentang Pelbagai Problem Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Herlambang, T. Y. (2018). *Pedagogik Telaah Kritis Ilmu Pendidikan dalam Multiperspektif*. Jakarta: Bumi Aksara
- Ismaun. (1981). *Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia*. Bandung: Carya Remadja
- Kaderi, A. (2015). *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*. Banjarmasin: Aswaja Pressindo
- Muzayin. 1992. *Ideologi Pancasila (Bimbingan ke Arah Penghayatan dan Pengamalan bagi Remaja)*. Jakarta: Golden Terayon Press.
- Rahman, A. (2018). Nilai Pancasila Kondisi dan Implementasinya dalam Masyarakat Global. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 3 (1), 34-48.
- Rosyad, A. M. (2019). The Implementasi Nilai-Nilai Multikulturalisme Melalui Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (The Implementation Of Multiculturalism Values Through Learning Of Islamic Religion Education). *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 5(1, March), 1-18.
- Salim, A. (2002). *Perubahan Sosial*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya
- Sarifah, N. P., & Barus, U. (2019, February). Sosialisasi Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama Dalam Kaitannya Dengan Pembentukan Karakter Bangsa Untuk Mencegah Konflik Antar Beragama. In *Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian (Vol. 2, No. 1, pp. 634-638)*.
- Setijo, P. (2010). *Pendidikan Pancasila Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa*. Jakarta: Grasindo
- Soemantri, S. (1992). *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni
- Subandi, A. M. (2001). *Pancasila dan UUD 1945 Dalam Paradigma Reformasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Wiratmaja, I. N., Suacana, I. W. G., & Sudana, I. W. (2021). Penggalan Nilai-Nilai Pancasila Berbasis Kearifan Lokal Bali Dalam Rangka Penguatan Wawasan Kebangsaan. *POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 1(1), 43-52.
- Yamin, M. (1960). *Gajah Mada Pahlawan Persatuan Nusantara*. Jakarta: Dinas Penerbitan Balai Pustaka.
- Zubaedi, M. A. (2016). *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik*. Kencana.